



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8129-8141

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Aktualisasi Government Sebagai Katalisator Empiris: Formsiswa Dengan *Educational Dissemination* Bias Pemerataan Sistem Pendidikan Kota Bekasi

Muhammad Tunjang Syaeh^{1✉}, Harlin Sabrinda Rasya², Suprima³, Subakdi⁴, Satino⁵,
Rifa Atiyah⁶

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: mtunjangsyaeh@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perubahan tatanan kehidupan yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari disebut revolusi. Proses aktivitas ini berpengaruh pada sistem pendidikan yang efektif dimana dapat memberikan siswa keterampilan menyampaikan, menyimpulkan, mencari, serta menggunakan teknologi dan informasi. Reorientasi pengembangan kurikulum dengan fokus pada pembelajaran berbasis teknologi informasi (TIK), internet of things, big data, dan komputerisasi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif pada era global. Salah satu faktor penentu kemajuan suatu negara adalah kualitas pendidikannya, dengan kata lain, kemajuan suatu negara atau negara dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Indonesia memiliki salah satu asas pemerataan pendidikan yang adil. Menurut prinsip manfaat, pendidikan harus mempertimbangkan manfaatnya bagi masa depan siswa, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Meskipun demikian, asas manfaat, adil, dan merata berarti bahwa pendidikan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Asas ini juga mencakup asas nondiskriminatif, yang melihat setiap orang Indonesia sebagai individu yang bebas dari diskriminasi.

Kata Kunci : *Debit banjir, angkutan sedimen, agradasi, degradasi*

Abstract

Changes in the order of life caused by human activities in meeting daily needs are called revolutions. This activity process influences the education system. Effective education can give students the skills to search, convey and conclude as well as use technology and information. Reorient curriculum development with a focus on learning based on information technology (ICT), internet of things, big data and computerization to produce graduates who are competitive in the global era. One of the determining factors for a country's progress is the quality of its education; in other words, the progress of a state or country can be seen from the quality of its education. Indonesia has the principle of fair distribution of education. According to the principle of benefit, education must consider its benefits for the future of students, society, nation, state and religion. However, the principles of benefit, fairness and equality mean that education must be accessible to all levels of society according to their abilities and needs. This principle also includes the principle of non-discrimination, which sees every Indonesian as an individual free from discrimination.

Keyword: Keywords contain basic ideas or concepts that represent the field under study; The number of keywords is between 3-5 Phrases and are sorted alphabetically

PENDAHULUAN

Meningkatkan kesejahteraan nasional adalah salah satu tujuan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut deklarasi ini, setiap warga negara Republik Indonesia, terlepas dari status sosial ekonomi, etnis, agama, ras, atau gender, memiliki hak atas pendidikan terkemuka yang disesuaikan dengan kepentingan dan kemampuan mereka. Orang-orang Indonesia akan memiliki keterampilan hidup, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pribadi dengan lingkungan mereka, dengan mengintegrasikan peluang pendidikan dan prestasi mereka dengan lingkungan mereka. Ini akan menyokong pertumbuhan masyarakat kontemporer yang didasari dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dimulai pada 2 Mei 1984, dengan kesimpulan dari Pelita III (proyek pembangunan lima tahun), yaitu program pendidikan wajib. Soeharto mengatakan pada awalnya bahwa tujuan programnya adalah untuk menyediakan setiap anak Indonesia, berusia 7 hingga 12 tahun, akses yang sama ke pendidikan dasar. Semua anak dari tujuh hingga dua belas tahun diharuskan untuk menyelesaikan pendidikan dasar enam tahun sebagai bagian dari Program Pendidikan Wajib (SD).

Kebijakan ini tidak sama dengan kebijakan pendidikan wajib yang menghukum individu dan memaksa mereka untuk mematuhi. Orang tua hanya dapat membiarkan anak-anak mereka yang berusia 7 hingga 12 tahun bersekolah, menurut pihak berwenang. Infrastruktur dan tenaga kerja yang diperlukan untuk pendidikan, serta bangunan dan persediaan yang diperlukan untuk sekolah, harus disediakan oleh negara. Pemerintah pada

saat itu menawarkan beasiswa kepada anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah dalam upaya untuk memperkuat skema pendidikan wajib. Hasilnya adalah Program Gerakan Nasional (GNOTA). Keputusan bersama nomor 34/huk/1996, nomor 88/1996, nomor 0129/u/1996, dan nomor 195/1996 dirilis oleh para menteri urusan sosial, urusan dalam negeri, pendidikan dan budaya, dan agama untuk meningkatkan Implementasi GNOTA. Perintah ini membahas bantuan untuk anak-anak yang tinggal dilokasi yang jauh, anak-anak penyandang cacat, dan anak-anak kurang mampu.

Untuk mengembangkan negara, pemerintah Indonesia memulai kurikulum pendidikan dasar sembilan tahun yang dituntut dari semua siswa. Menurut catatan Pusat Data Balitbang Kementerian Pendidikan dan Budaya, Tingkat Partisipasi Kasar SMP/MTS (APK) tumbuh selama periode waktu yang singkat namun, karena berbagai keadaan di Indonesia, inisiatif ini menghadapi sejumlah kesulitan. Pendidikan masih memiliki sejumlah kesulitan dan hambatan, terutama dalam menyelesaikan program Wajib Dikdas berusia sembilan tahun dengan cara yang adil dan sama.

Sebagaimana dikemukakan Soedijarto dalam jurnal Yafi, dkk, "*Compulsary Education*" adalah kebijakan yang mengamanatkan warga negara yang sudah memasuki usia sekolah untuk bersekolah sampai tingkat tertentu, dan pemerintah memberikan dukungan penuh untuk memastikan pesertanya terdorong untuk bersekolah, belajar dan menghadiri kelas. Dalam program wajib belajar yang sebenarnya, seperti yang terdapat di AS, Skandinavia, Jerman, dan Jepang, siswa dibebaskan dari pembayaran buku dan kebutuhan pendidikan lainnya selain biaya sekolah. Disini, tujuan wajib sekolah adalah untuk memenuhi "Hak" anak atas pendidikan. Kenyataannya, orang tua yang tidak mendaftarkan anak usia wajib sekolahnya akan menghadapi dampak hukum di negara-negara tertentu. Mengenai gagasan "wajib belajar" yang diterjemahkan menjadi "Wajib belajar" berarti bahwa hak-hak anak atas pendidikan dan pembelajaran telah terpenuhi jika diterapkan di negara-negara industri, sebagaimana telah dikatakan sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintah khususnya Kemendikbud telah sadar pentingnya gagasan-gagasan tersebut.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2009–2014 menyatakan bahwa pemerintah telah mengganti Nama konsep "Wajib belajar" menjadi "Hak untuk belajar". Berdasarkan Bab I, hal ini merupakan hasil mempertimbangkan sejumlah persyaratan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ayat (1) Pasal 11 berbunyi: "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan fasilitas, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi" Selanjutnya Pasal 34 Ayat (2) menegaskan kembali ayat tersebut dengan mengatakan bahwa "Pemerintah dan

pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada tingkat pendidikan minimal dasar tanpa memungut biaya." Lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat (3), "Masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan pemerintah melaksanakan tanggung jawab negara terhadap wajib belajar."

Pada tanggal 2 Mei 1994, Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwa program wajib belajar selama 12 tahun akan diberlakukan. Padahal, program wajib belajar yang berlangsung selama sembilan tahun hanyalah permulaan. Pendidikan yang diamanatkan untuk diterima oleh seluruh warga negara Indonesia selama sembilan tahun tidak sebanding dengan pendidikan yang diamanatkan di negara-negara Barat. Hal ini tidak sama dengan wajib belajar karena undang-undang yang mengatur tentang wajib belajar mengatur unsur-unsur keterpaksaan yang wajib ditaati oleh siswa; keberhasilan wajib belajar ditentukan oleh tidak adanya sanksi orang tua yang mendorong anaknya untuk tidak masuk sekolah; dan orang tua yang membiarkan anaknya bolos sekolah akan menanggung akibatnya.

Pendidikan berkembang sebagai respons terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya. Pendidikan sangat dihargai karena sangat diperlukan bagi seluruh umat manusia. Pendidikan mendorong pertumbuhan intelektual dan perolehan informasi, memungkinkan individu untuk beradaptasi dan maju dalam dunia yang berkembang pesat. Ini adalah investasi berharga bagi masa depan anak. Mengingat anak-anak mewakili masa depan negara, pendidikan mempunyai arti penting dalam membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi manusia yang cakap dan mampu mengatasi tantangan apa pun yang mungkin mereka hadapi. Dengan bekal ilmu, anak-anak mempunyai kemampuan untuk memotivasi Indonesia yang kini tertinggal dibandingkan negara lain. Hal ini terlihat dari kriteria kelulusan Indonesia yang masih jauh di bawah negara lain.

Setiap aspek pendidikan yang ada saat ini harus terus ditingkatkan oleh pemerintah. Mengembangkan rencana yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan di Indonesia diperlukan untuk memenuhi target pendidikan nasional tersebut. Hal ini penting untuk mengambil langkah-langkah guna membangun kerangka konseptual kontemporer dan menarik minat masyarakat. Pergeseran ini berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi yang digunakan dalam inisiatif literasi untuk menjamin masyarakat memiliki akses yang efektif dan efisien terhadap segala pengetahuan, informasi, dan metode ilmiah. Pemanfaatan ide pengalaman pengunjung untuk mencoba membangun perpustakaan digital pada Era Masyarakat 4.0. Ketimpangan distribusi pendidikan dalam lanskap pendidikan saat ini merupakan permasalahan yang signifikan, khususnya di wilayah

pedesaan. Masih terdapat ketimpangan dalam pendidikan di Indonesia, seperti yang terlihat dari rendahnya sumber daya, buruknya infrastruktur, kekurangan guru, penggunaan metode pengajaran tradisional, dan kendala keuangan. Proses pencapaian kesetaraan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas. Dalam hal penerimaan mahasiswa baru, banyak institusi yang mempunyai kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang diterima. Oleh karena itu, proses belajar mengajar menyimpang dari keadaan idealnya. Oleh karena itu, pemerataan sekolah di wilayah pedesaan dan perkotaan diperlukan untuk mencapai pendidikan berkualitas tinggi.

Untuk mengurangi perbedaan kesejahteraan antar wilayah, pemerintah mendorong kesetaraan dalam sistem pendidikan. Selain itu, juga berfungsi mempertebal rasa nasionalisme, persatuan, dan kebangsaan diseluruh wilayah Indonesia. Kenyataan bahwa banyak daerah di Indonesia masih menghadapi hambatan topografis terhadap pengetahuan, komunikasi, dan transportasi inilah yang mendorong upaya pemerintah untuk mendemokratisasi pendidikan. Masyarakat di daerah ini masih merasa tertinggal karena hambatan geografis yang menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Angka partisipasi sekolah, atau APrS (angka partisipasi sekolah), adalah ukuran berapa banyak anak disuatu komunitas yang memperoleh pendidikan dibandingkan dengan keseluruhan populasi. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi kesetaraan dan akses terhadap pendidikan. Pelayanan pendidikan di daerah tersebut dievaluasi untuk melihat apakah memenuhi kriteria mutu yang dipersyaratkan dengan menggunakan kriteria APrS 85%. Jika tujuan ini tercapai, pemerintah akan mampu memberikan layanan pendidikan menengah kepada warganya. Hal ini menunjukkan bahwa aksesibilitas fundamental institusi pendidikan di wilayah tersebut juga sangat memadai. Persentase anak-anak Indonesia yang bersekolah di dalam pendidikan dasar telah meningkat, sementara persentase siswa yang bersekolah di pendidikan menengah dan tinggi masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah lulusan SMP/MTs atau program sejenis yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA atau gelar lain yang sebanding.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ilmiah menguraikan tentang metode dan pendekatan yang digunakan (kualitatif, studi kasus, kajian literature dan survei turun langsung ke lapangan). Selain menjelaskan metodologi, pada bagian ini juga penulis harus menguraikan sumber data penelitian, teknik analisis data serta teknik pengumpulan data yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah menjalankan proses penelitian yang cukup panjang kurang lebih selama tiga bulan terkait dengan proyek ini. Hasil penelitian yang kami dapatkan dari studi kasus sistem zonasi yang ada di wilayah Kota Bekasi menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Indonesia yang menempuh jenjang pendidikan dari SMP sampai dengan SMA baik itu dari segi orang tua hingga ke siswa sendiri, mereka merasakan bahwasanya dengan adanya sistem zonasi ini kurang efektif dikarenakan seorang anak menjadi cenderung pemalas dan semangat dalam mengejar nilai atau ilmu pengetahuan menurun. Tidak hanya itu saja orang tua dan siswa juga menganggap bahwa dengan adanya sistem zonasi ini belum dapat diterapkan di Indonesia sepenuhnya hal itu dikarenakan masih ada label sekolah favorit serta kesenjangan dari segi fasilitas antar sekolah, hal itu akan berdampak buruk terhadap siswanya sendiri, adapun beberapa yang dipertimbangkan dari orang tua dan siswa sebagai berikut:

1. Dengan ketidakmerataan fasilitas sekolah siswa yang merasa memiliki potensi lebih dan cukup mumpuni dalam sebuah perlombaan tersebut tetapi tidak di *support* oleh sekolah dikarenakan tidak adanya fasilitas yang memadai/kurang lengkap dan hal itu membuat seorang siswa akan mengalami *stuck*/ atau ketidakberkembangan terhadap penggalian potensi yang ada didalam diri tersebut.
2. Tidak ada semangat sekolah, karena *mindset* mereka yang tertanam saat ini adalah siswa dengan jarak rumahnya dekat pada sekolah favorit menganggap bahwa dia akan masuk kesana, sehingga tidak ada lagi persaingan yang dimunculkan dari segi pembelajaran.
3. Mungkin seorang siswa yang bertransformasi dari SMP ke SMA tidak terlalu risau karena stratanya masih sama, tetapi hal itu berbeda dengan siswa yang dari SMA menuju Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Negeri/PTN kerap kali masih memperhitungkan dari sekolah SMA yang berlabel favorite sehingga untuk menuju Perguruan Tinggi Negeri favorite harus ditopang dengan sekolah SMA yang berlabel favorite juga.
4. Dan lebih parahnya lagi selama proses seleksi melalui sistem zonasi banyak sekali beberapa oknum yang berbuat curang terhadap penyeleksian ini, dikarenakan banyak sekali para oknum yang merubah titik lokasi rumah mereka dengan ke lingkungan sekolah atau SMA favorite guna mendapatkan sekolah yang mereka impikan.

Tabel 2.3 Persentase Ruang Kelas Menurut Jenjang Pendidikan dan Kondisi, Tahun Ajaran 2017/2018 dan 2018/2019

| Jenjang Pendidikan | Kondisi Ruang Kelas TA 2017/2018 | | | Kondisi Ruang Kelas TA 2018/2019 | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| | Baik | Rusak Ringan/ Sedang | Rusak Berat/ Total | Baik | Rusak Ringan/ Sedang | Rusak Berat/ Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| SD | 26,41 | 63,59 | 10,00 | 27,40 | 63,91 | 8,69 |
| SMP | 29,70 | 61,46 | 8,84 | 31,28 | 61,32 | 7,40 |
| SMA | 44,79 | 50,84 | 4,36 | 44,53 | 51,36 | 4,12 |
| SMK | 46,67 | 50,44 | 2,89 | 47,35 | 50,78 | 1,87 |

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dari keempat penjabaran tersebut menjadi landasan yang konkrit bahwa dengan adanya sistem zonasi ini akan lebih banyak mendatangkan mudharatnya dibanding positifnya, dan yang paling krusial bagi para orang tua ialah ketika sistem zonasi ini berlarut-larut tanpa diiringi dengan pemerataan fasilitas pendidikan yang memadai yang dikhawatirkan adalah tidak adanya semangat atau persaingan dalam dunia pendidikan serta tidak adanya penggalan potensi yang ada didalam diri mereka dikarenakan fasilitas yang kurang memadai.

Disamping itu juga para orang tua menegaskan bahwa sistem zonasi ini memang hakikatnya baik tetapi dengan catatan apabila semua fasilitas sekolah sudah sama dan Perguruan Tinggi Negeri/PTN juga menerima berdasarkan kesetaraan sekolah bukan berdasarkan label favorit sekolah, sehingga perlu adanya kajian ulang terkait masalah ini.

Selain itu juga tanggapan peran orang tua yang memiliki buah hatinya dari jenjang SD, SMP hingga SMA terkait kurikulum merdeka ini adalah sejauh ini bagus dan dapat melatih seorang siswa menjadi pribadi yang mandiri, supel, aktif dan mandiri hal itu dibuktikan dengan adanya penalaran soal ujian yang tidak terpaku pada materi saja melainkan ia harus berpacu pada nalar yang harus diselesaikan disamping itu juga dengan adanya kurikulum merdeka peran orang tua menganggap bahwasannya ini dapat melatih keterampilan skill baik itu dari segi *soft skill* ataupun *hard skill* karena akan adanya proyek yang diberikan oleh guru tersebut untuk diselesaikan secara bersama. Di samping itu, dengan adanya kurikulum merdeka munculah P5 yaitu, penguatan karakter Pancasila dengan harapan dengan adanya penguatan ini bisa melatih seorang siswa agar lebih taat serta mengamalkan nilai Budi luhur yang tidak terlupakan oleh dirinya masing-masing.

Di samping itu juga para orang tua menganggap dengan adanya kurikulum merdeka Rencana pembelajaran semester (RPS) pendidikan masih belum terarah sepenuhnya dikarenakan kurikulum merdeka ini baru ada dan ada berapa program pembelajaran seperti P5 yang dinilai masih banyak kekosongan pembelajaran.

Pembahasan

Objek Penelitian Kota Bekasi merupakan mitra utama DKI Jakarta, ibu Kota Republik Indonesia, dan merupakan lokasi yang sangat penting. Kota yang memiliki luas wilayah sekitar 210,49 km² ini terletak di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997, letak geografis Kota Bekasi secara logika membawa sejumlah manfaat dan persoalan dalam konteks kewilayahan. Fakta bahwa Kota Bekasi dieksploitasi untuk urbanisasi adalah isu lain yang muncul, khususnya bagi pencari kerja lokal. Kemajuan pendidikan di Kota Bekasi juga dipengaruhi oleh laju urbanisasi yang semakin meningkat. Hal ini didasari oleh pendidikan yang merupakan salah satu komponen investasi sumber daya manusia, dan investasi manusia dapat menjadi faktor penentu utama keberhasilan pembangunan Kota Bekasi.

Program Wajib Belajar 12 Tahun dirancang untuk memberikan warga Kota Bekasi daya saing yang mereka perlukan pada era globalisasi yang semakin canggih dan mampu memenuhi tuntutan industri ketenagakerjaan. Kondisi inilah yang menjadi alasan Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen mengembangkan pendidikan yang berkualitas.

Daya Tampung

1) Jenjang SD

Kemampuan suatu daerah untuk tumbuh dengan sukses bergantung pada sumber daya manusianya. Pendidikan merupakan salah satu taktik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan taraf pendidikan terus diupayakan, dimulai dengan memberikan akses terhadap peluang pendidikan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dan meningkatkan kualitas serta jumlah lembaga dan infrastruktur pendidikan. Untuk menentukan berapa banyak penduduk yang menggunakan lembaga pendidikan, dapat dilihat persentase penduduk berdasarkan angka partisipasi sekolah. Kabupaten Bekasi Timur mempunyai SD Negeri terbanyak yaitu sebanyak 69 sekolah. Disusul Kabupaten Bekasi Barat sebanyak 50 sekolah dan Kabupaten Bekasi Utara sebanyak 49 sekolah. Dengan hanya 17 SD, Kecamatan Bantargebang memiliki SD negeri paling sedikit. Kecamatan Mustika Jaya (59), Rawa Lumbu (95), Kecamatan Bekasi Timur (72), dan Kecamatan Bekasi Utara (33), merupakan kecamatan dengan SD swasta terbanyak. Kecamatan Bekasi Barat dengan 30 sekolah dan Kecamatan Medan Satria dengan 32 sekolah juga memimpin. Kabupaten dengan jumlah SD swasta paling sedikit adalah Kecamatan Bantargebang, yaitu sembilan.

| No. | Kecamatan | Jumlah SD Negeri | Jumlah SD Swasta | JML Rombe | Rata-rata siswa perkelas | Daya Tampung |
|-----|----------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 1. | Pondok Gede | 37 | 21 | 574 | 40 | 33.480 |
| 2. | Jati Sampurna | 19 | 14 | 284 | 37 | 15.133 |
| 3. | Pondok Melati | 19 | 14 | 274 | 45 | 18.405 |
| 4. | Jatiasih | 39 | 25 | 514 | 37 | 31.437 |
| 5. | Bantargebang | 17 | 9 | 248 | 45 | 16.110 |
| 6. | Mustika Jaya | 23 | 17 | 418 | 37 | 29.190 |
| 7. | Bekasi Timur | 69 | 24 | 766 | 45 | 48.006 |
| 8. | Rawalumbu | 37 | 27 | 510 | 42 | 38.766 |
| 9. | Bekasi Selatan | 40 | 23 | 460 | 38 | 28.576 |
| 10. | Bekasi Barat | 50 | 30 | 615 | 32 | 28.800 |
| 11. | Medan Satria | 22 | 32 | 272 | 43 | 28.251 |
| 12. | Bekasi Utara | 49 | 33 | 762 | 30 | 35.130 |
| | Jumlah | 421 | 269 | 5661 | 431 | 351.284 |

Sumber : DPRD Kota Bekasi

2) Jenjang SMP

Terdapat 254 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kota Bekasi pada tahun ajaran 2016-2017, naik 6,0% dari 249 sekolah pada tahun sebelumnya, menurut statistik dari profil pendidikan kota tersebut. Terdapat 208 SMP Negeri dan 49 SMP Negeri, meningkat 20% dari 41 sekolah. sekolah menengah pertama swasta, meningkat 3,4% dibandingkan 208 sekolah sebelumnya. Terdapat 3.381 kelompok belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berarti hampir dua kelompok belajar dipergunakan di setiap kelas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian sekolah melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam satu shift, namun satuan pendidikan SMP Negeri Kota Bekasi rata-rata menyelenggarakan KBM dalam dua shift.

| No. | Kecamatan | Jumlah SD Negeri | Jumlah SD Swasta | JML Rombe | Rata-rata siswa perkelas | Daya Tampung |
|-----|----------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 1. | Pondok Gede | 4 | 18 | 253 | 40 | 10..120 |
| 2. | Jati Sampurna | 3 | 11 | 171 | 35 | 5.985 |
| 3. | Pondok Melati | 1 | 12 | 151 | 42 | 6.342 |
| 4. | Jatiasih | 7 | 20 | 327 | 45 | 14.715 |
| 5. | Bantargebang | 3 | 6 | 125 | 37 | 4.625 |
| 6. | Mustika Jaya | 5 | 13 | 258 | 40 | 10.320 |
| 7. | Bekasi Timur | 6 | 23 | 442 | 40 | 17.680 |
| 8. | Rawalumbu | 4 | 21 | 375 | 38 | 14.250 |
| 9. | Bekasi Selatan | 4 | 15 | 258 | 40 | 10.320 |
| 10. | Bekasi Barat | 3 | 20 | 248 | 40 | 9.920 |
| 11. | Medan Satria | 3 | 23 | 279 | 40 | 11.160 |
| 12. | Bekasi Utara | 6 | 33 | 494 | 40 | 19.760 |
| | JUMLAH | 49 | 215 | 3381 | 519 | 135.197 |

Sumber : DPRD Kota Bekasi

3) Jenjang SMA/SMK

Secara keseluruhan, terdapat 98 SMA di Kota Bekasi, meningkat 8,89% dibandingkan tahun 2015. Penambahan delapan SMA swasta baru menambah jumlah sekolah di Kecamatan Pondokgede sebanyak satu sekolah dan Kecamatan Jati Sampurna sebanyak dua sekolah. Setiap sekolah di wilayah Kecamatan Jatiasih, Mustikajaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, dan Bekasi Barat.

Siswa yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebanyak 18 orang atau 18,37% dan siswa yang bersekolah di SMA Swasta sebanyak 72 siswa atau atau 81,63%. Kecamatan Bekasi Selatan, Jatiasih, Bekasi Timur, dan Bekasi Utara merupakan kecamatan dengan jumlah partisipasi SMA Negeri terbanyak. Terdapat 1.519 kelompok belajar di SMA, yang menunjukkan bahwa hampir dua kelompok belajar ditempatkan di setiap kelas. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pendidikan SMA Negeri dan Swasta Kota Bekasi masih sering melakukan kegiatan belajar mengajar dalam beberapa shift, meskipun ada sekolah-sekolah tertentu yang sudah menerapkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) satu shift.

| No. | Kecamatan | Jumlah SD Negeri | Jumlah SD Swasta | JML Rombe | Rata-rata siswa perkelas | Daya Tampung |
|-----|----------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 1. | Pondok Gede | 1 | 4 | 70 | 36 | 2.520 |
| 2. | Jati Sampurna | 1 | 5 | 88 | 40 | 3.520 |
| 3. | Pondok Melati | 1 | 6 | 92 | 36 | 3.312 |
| 4. | Jatiasih | 2 | 8 | 172 | 36 | 6.192 |
| 5. | Bantargebang | 1 | 0 | 18 | 42 | 756 |
| 6. | Mustika Jaya | 1 | 3 | 72 | 36 | 2.592 |
| 7. | Bekasi Timur | 2 | 10 | 189 | 36 | 6.804 |
| 8. | Rawalumbu | 1 | 7 | 120 | 36 | 4.320 |
| 9. | Bekasi Selatan | 4 | 8 | 175 | 40 | 7.000 |
| 10. | Bekasi Barat | 1 | 7 | 132 | 40 | 4.752 |
| 11. | Medan Satria | 1 | 9 | 176 | 36 | 6.336 |
| 12. | Bekasi Utara | 2 | 13 | 215 | 36 | 7.740 |
| | JUMLAH | 18 | 80 | 1.519 | 486 | 55.844 |

Sumber : DPRD Kota Bekasi

Program pemerintah yang disebut Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) dan BOSDA (BOS) membiayai belanja non-pegawai untuk sekolah dasar, SMP, dan SMA dalam rangka melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Meskipun dimungkinkan untuk mendanai sejumlah operasi berbeda yang termasuk dalam biaya pegawai dan investasi, BOS mendapat prioritas jika menyangkut biaya operasional non-pribadi. Tujuan utama program BOS adalah untuk mengurangi beban keuangan masyarakat dalam bidang pendidikan dengan tetap menjaga standar wajib belajar sembilan tahun. Program BOS bertujuan untuk menjangkau seluruh siswa di SD, SMP, MTs, SMPT, serta juga SMA/K. Pedoman peraturan perundang-undangan pengendalian uang BOS didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Kami memberikan beberapa dukungan kepada sekolah swasta dan negeri meskipun dalam jumlah yang berbeda. Hal ini karena orang tua masih diharuskan membayar biaya sekolah swasta. Oleh karena itu, kami tidak menyediakan seluruh anggaran. Pemerintah Kota Bekasi menawarkan dukungan semacam ini kepada anak-anak yang berprestasi secara akademis, anak-anak dari latar belakang kurang mampu, Al-Qur'an Tahfiz. Dana Bantuan

Sekolah (BOS) Pemerintah dan Dana Bantuan Kota Bekasi (BOSDA) adalah sebagai berikut:

| No. | Tingkat | BOS/Siswa | BOSDA/Siswa | Jumlah |
|-----|---------|-----------|-------------|-----------|
| 1. | SD | Rp66.000 | Rp28.000 | Rp94.000 |
| 2. | SMP | Rp83.000 | Rp90.000 | Rp173.000 |
| 3. | SMA | Rp116.000 | Rp 170.00 | Rp286.000 |

Regulasi pemerataan sistem pendidikan dari segi pemerintah

Adapun regulasi pemerintah dari segi kurikulum merdeka adalah melalui supervisi serta mentoring evaluasi dari pihak yang berwenang. Akan dilakukan mentoring secara rutin misalnya dalam beberapa minggu sekali, adapun supervisi sendiri dilakukan oleh pihak *external* sekolah guna untuk mengukur sejauh mana guru tersebut mumpuni dalam menjabarkan praktik dari kurikulum merdeka ini. Akan ditinjau apakah layak untuk dipertahankan atau perlu bahan evaluasi lebih lanjut, sedangkan untuk mentoring dilakukan oleh pihak internal sekolah itu sendiri dari guru lain guna menilai sejauh mana anak murid tersebut paham dan dapat mengaplikasikan dari proyek mereka secara mandiri.

Disisi lain juga regulasi pemerintahan yang dibangun dari sistem zonasi meliputi peraturan serta penjagaan yang super ketat supaya tidak terjadi lagi kecurangan untuk memindahkan titik lokasi zonasi terhadap sekolah favorit serta adapun hasil dari diskusi proyek kami juga menjadi bahan evaluasi bagi dewan legislatif yaitu DPRD Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi dari pemerataan fasilitas pendidikan agar tidak adanya kesenjangan dari sekolah satu dengan sekolah lainnya.

SIMPULAN

Simpulan dari artikel ilmiah ini adalah pemerintah DPRD Kota Bekasi terus melakukan yang terbaik bagi daerahnya jika memang dari aspirasi masyarakat dirasa kurang baik maka dewan legislatif/DPRD Kota Bekasi akan siap menampung semua keluhan dari masyarakatnya dan menjadi bahan pertimbangan untuk kebijakan kedepannya.

Disisi lain juga menurut dari pihak orang tua dengan adanya sistem pembelajaran melalui kurikulum merdeka ini anak menjadi lebih aktif dan siapa saja bisa menjadi pemimpin karena seorang anak akan dilatih mentalnya untuk berani bicara dan berani untuk bertanggung jawab atas proyek yang telah mereka lakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A., Aini, F. N., & Ranjani, R. (2023). Dampak Transformasi Pendidikan Melalui "MOOCs" Di Era Revolusi Industri 5.0. Dinamika: *Jurnal Ilmiah Ilmu* 10.
- Ati, A. P., & Widiyanto, S. (2020). Literasi bahasa dalam meningkatkan minat baca dan menulis pada siswa smp kota bekasi. *Basastra, Jurnal Laju Partisipasi Sekolah* 9(1).
Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Profil Pembangunan Pendidikan Kota Bekasi.(Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Bekasi 2017).
- Eko, C. (2014). Bab I Pendahuluan. Universitas Andalas.
- Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2).
- Misna, A., Misna, Kebijakan, F., Dana Desa, A., Kandolo, D., Teluk, K., & Kabupaten, P. (2015). Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Peran Pemuda* 3(2).
- Rares, A. D. T. J. M. J., & Abstract. (2018). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Kecamatan Tagulandang Kabupaten Sitaro. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69).
- Ratnasari, S. L. (2017). Aktualisasi peran pemimpin nasional dalam pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata. *Jurnal Dimensi*, 6(3).
- Thomas Joni Verawanto Aristo. (2019). Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan Di Kabupaten Sintang. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* 7 (1).
- Uhar Suharsaputra. Metode Penelitian: kuantitatif, Kualitatif, dan tindakan. (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- Undang-undang Dasar 1945
- Vera, S., & Hambali, R. Y. A. (2021). Aliran Rasionalisme dan Empirisme dalam Kerangka Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 1(2).
- Yafi, Z., & Kurniawan, A. (2022). Perancangan Buku Sejarah Rengasdengklok Sebagai Pengayaan Mata Pelajaran Siswa Sma. Fad.